

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah perkotaan adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga, dan sejumlah fasilitas perkotaan lain seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.

Perkembangan suatu Kota dapat dicirikan dari penduduknya yang makin bertambah dan makin padat, bangunan-bangunannya yang semakin rapat dan wilayah terbangun terutama permukiman yang cenderung semakin luas, serta semakin lengkapnya fasilitas Kota yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi Kota (Branch, 1996). Daerah perkotaan memiliki infrastruktur yang lebih baik jika dibandingkan dengan daerah desa, hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek mulai dari keadaan jalan, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, hingga pada fasilitas kesehatan umum. Tentu perbedaan ini menjadi pendorong utama bagi masyarakat yang tinggal di Kota untuk terus berkembang.

Namun pada kenyataannya pemerintah Kota seringkali mengalami kesulitan dalam menangani infrastruktur yang ada di Kota, terutama penanganan sarana prasarana permukiman yang akhirnya melahirkan permukiman yang tidak memenuhi standar Pemenuhan atau biasa disebut permukiman kumuh. Dengan jumlah penduduk serta kepadatan permukiman yang tinggi akan muncul berbagai kebutuhan baik dari segi lingkungan ataupun manusia dan hal ini dapat dipenuhi dengan adanya sarana prasarana yang memadai pada suatu wilayah.

Kepadatan penduduk di kota akan selalu diikuti oleh penambahan kebutuhan ruang untuk permukiman. Namun tanah yang ada selalu mempunyai luas yang relatif tetap dan karena secara administratif wilayah Kota terbatas, maka dalam perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah maka pembangunan akan

bergerak ke pinggiran Kota. Peningkatan jumlah penduduk Kota yang berlebihan akan menimbulkan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di suatu daerah. Dari jumlah penduduk yang tinggi tersebut akan muncul berbagai kebutuhan yang dimana bila tidak dipenuhi akan muncul dampak terhadap Pemenuhan daerah yang ditinggali.

Tingginya kepadatan penduduk pada suatu wilayah harus di seimbangi oleh sarana prasarana pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan dari wilayah tersebut. Tingkat kekumuhan dapat dinilai dari keberadaan sarana prasarana yang dibangun pada suatu wilayah baik dalam kuantitas maupun kualitas sarana prasarana yang ada.

Menurut (Gilbert dan Gugler, 1996) permukiman kumuh di tengah Kota memiliki ciri perumahan bermutu rendah sekali, bangunan terbuat dari bahan-bahan yang tidak memenuhi persyaratan, kadangkala terdiri dari segala rupa bahan bekas, sanitasi dan penyediaan air bersih umumnya tidak tersedia atau kurang memadai. Di sisi lain, yang menyebabkan mereka untuk tetap bertahan atau tetap tinggal di sana, karena lokasinya yang dinilai cukup strategis, serta berdekatan dengan tempat kerja, dimana mereka mencari nafkah.

Kota Jakarta merupakan Ibu Kota Indonesia yang memiliki perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat diberbagai bidang dan sektor. Melihat pertumbuhan Kota Jakarta yang begitu cepat dan pesat, yang dikarena oleh banyak faktor seperti pusat perkantoran, perdagangan, pemerintahan, perdagangan, bisnis dan permukiman menyebabkan banyak masyarakat yang cenderung untuk mencari penghasilan di Jakarta.

Ciri khusus yang dimiliki oleh Jakarta adalah salah satu provinsi yang sangat pesat pembangunannya baik pembangunan fisik ataupun pembangunan ekonomi serta mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan tidak luput dari keberadaan lingkungan kumuh. Kondisi seperti ini membuat Kota Jakarta diserbu oleh para pendatang dan dengan jumlah yang terus meningkat tiap tahunnya sehingga menyebabkan tingkat populasi semakin tinggi. Hal ini menyebabkan kebutuhan dan permintaan akan tempat tinggal juga menjadi meningkat.

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota administratif, yaitu Kota Administratif Jakarta Pusat dengan luas wilayah 48,1 km², Kota Administratif Jakarta

Utara dengan luas wilayah 146,7 km², Kota Administratif Jakarta Barat dengan luas wilayah 129,5 km², Kota Administratif Jakarta Selatan dengan luas wilayah 141,3 km², Kota Administratif Jakarta Timur dengan luas wilayah 188,0 km² serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 8,7 km².

Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan salah satu dari lima Kota Administrasi yang ada di DKI Jakarta, wilayah Jakarta Utara juga menempati urutan kedua sebagai wilayah yang memiliki RW kumuh terbanyak dengan jumlah 55 RW. Yaitu meliputi dua RW di Penjaringan dan Kalibaru masuk kategori berat, serta 53 RW berkategori sedang dan ringan. di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagian besar terdiri dari tanah daratan hasil dari pengurukan rawa-rawa yang mempunyai ketinggian rata-rata 1 meter di atas permukaan laut terutama kita temukan di sepanjang pantai. Penggunaan luas tanah daratan di Kota Administrasi Jakarta Utara 146,67 km². Dirinci berdasarkan penggunaan 47,58% untuk perumahan, 15,87% untuk areal industri, 8,89% digunakan sebagai perkantoran dan pergudangan dan sisanya merupakan lahan pertanian, lahan kosong dan sebagainya.

Berdasarkan data dari laporan badan pusat statistik pada bulan Desember 2020 penduduk di wilayah Jakarta Utara berjumlah 1.827.731 jiwa, dengan jumlah luas tanah yang terbatas pemerintah Kota administrasi Jakarta Utara perlu banyak melakukan pembenahan dalam membuat area permukiman menjadi lokasi yang layak huni. Namun pada kenyataannya masih banyak lokasi di Kota Jakarta Utara yang kondisi permukiman secara fisiknya masih dibawah standar Pemenuhan, selain itu kurangnya sarana prasarana yang ada menjadi penghambat dalam proses peningkatan Pemenuhan permukiman di wilayah Jakarta Utara.

Hal-hal diatas menunjukan adanya potensi kebutuhan pelayanan sarana prasarana penunjang permukiman yang diperlukan dalam menangani berbagai macam persoalan lingkungan sehingga pemerintah lewat kebijakannya mengatur segala standar pembangunan melalui SNI 03-1733-2004, dengan melihat kebutuhan berdasarkan beberapa aspek seperti jumlah penduduk dan luas penggunaan lahan yang ada di wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka perlu dilakukan suatu kajian mengenai

“Analisis Sarana Prasarana Perkotaan di Tingkat Kecamatan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara” sebagai solusi penanganan permukiman.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kebutuhan sarana prasarana lingkungan pada tingkat kecamatan di permukiman kota administrasi Jakarta Utara?
2. Bagaimana tingkat pemenuhan sarana prasarana di lingkungan kecamatan wilayah kota administrasi Jakarta Utara dibandingkan dengan kecamatan lain yang masih berada dalam wilayah kota administrasi Jakarta utara berdasarkan SNI 03-1733-2004?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian menjadi lebih terarah dan tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada korelasi kebutuhan dan tingkat pemenuhan sarana prasarana permukiman. Aspek yang dibahas terbatas pada sarana perdagangan dan niaga yaitu unit pasar dan pertokoan. Sarana pendidikan yaitu unit SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA baik negeri atau swasta. Sarana kesehatan yaitu unit Puskesmas, Posyandu, Balai Pengobatan Warga, Tempat Praktek Dokter, dan Apotik. Sarana ruang terbuka hijau yaitu unit RPTRA dan Tempat Pemakaman Umum. Sarana peribadatan yaitu unit Masjid, Gereja, Pura, dan Vihara. Sarana sosial dan budaya yaitu unit Balai Serbaguna. Pengukuran akan menggunakan metode analisis kebutuhan dan analisis Pemenuhan sarana prasarana dengan kriteria penilaian yang telah disesuaikan dari kebijakan standar nasional yang berlaku. Penelitian ini difokuskan pada tingkat kecamatan yang ada di wilayah kota administrasi Jakarta utara berdasarkan jumlah penduduk dan luas lahan di tiap kecamatan.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat pemenuhan sarana prasarana di tingkat kecamatan yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan SNI 03-1733-2004?

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan:

1. Sebagai pedoman dasar dalam penanganan sarana prasarana yang kurang memadai di Pusat Kota.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pemerintah daerah dalam melakukan

pengkajian tentang kebutuhan dan tingkat pemenuhan sarana prasarana di tingkat kecamatan di wilayah perkotaan.

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk masyarakat khususnya akademisi dalam melakukan penelitian tentang kebutuhan sarana prasarana apa saja yang diperlukan, guna membangun atau merevitalisasi sarana prasarana permukiman yang ada di Pusat Kota.

